

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PADA BPJS KESEHATAN**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Mira

NIM.49402000029

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PADA BPJS KESEHATAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Mira

NIM.49402000029

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira
NIM : 49402000029
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BPJS KESEHATAN”

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari di temukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,



Mira
Nim.49402000029

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Mira

NIM : 49402000029

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja
Keuangan Pada BPJS Kesehatan

Semarang, 31 Januari 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Ak., CA

NIK. 0612027401

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :


Nama : Mira
NIM : 49402000029
Program Studi : D-III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja
Keuangan Pada BPJS Kesehatan


Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Februari 2023

Penguji 2,

Penguji 1,


Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt., CA
NIK. 211414026


Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIK. 0612027401

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA


16-2-23

Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si
NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tak lupa Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Penulis Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada BPJS Kesehatan”.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., AK, selaku ketua Prodi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Ak., CA, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta

dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Khoirul Fuad, SE.,M.Si., Ak, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
5. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi Bapak Sabarudin dan Ibu Taniah yang tiada hentinya memberikan dukungan dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Nurul Khoiriyah selaku rekan peneliti dan telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Masih banyak sekali kekurangan yang dimiliki oleh penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun terhadap Tugas Akhir ini, agar Tugas Akhir ini menjadi Tugas Akhir yang baik dan benar.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca.

Semarang, 31 Januari 2023

Peneliti,



Mira

ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada BPJS Kesehatan. Kinerja keuangan merupakan usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi keuangan tertentu, dan melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Di dalam Kinerja Keuangan tersebut terdapat beberapa rasio yang digunakan peneliti dalam pengerjaan Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada BPJS Kesehatan ini, yaitu antara lain Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas. Data tugas akhir ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder mengacu kepada data yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Jenis penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil dan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada BPJS Kesehatan tergolong baik, karena setiap perbandingan mengalami kenaikan daripada penurunan, tetapi di rasio profitabilitas (*Return on Equity* dan *Return on Asset*) mengalami penurunan dikarenakan keuntungan di tahun tersebut menurun. Saran yang dapat dilakukan untuk penyelesaian di Tugas akhir yang diangkat peneliti yaitu agar kinerja keuangan sebaiknya selalu ditinjau secara terus menerus agar perubahan – perubahan yang terjadi pada keuangan perusahaan dapat terlihat dengan jelas dan pihak

manajemen dapat mengantisipasi dan dengan cepat mengambil keputusan untuk kemungkinan – kemungkinan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang serta untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, Kinerja Keuangan



ABSTRACT

This final project aims to find out Financial Ratio Analysis to Assess Financial Performance at BPJS Kesehatan. Financial performance is a formal attempt to evaluate the efficiency and effectiveness of a company in generating profits and a certain financial position, and to see how far a company has implemented it using financial implementation rules. properly and correctly. In the Financial Performance, there are several ratios that are used by researchers in carrying out Financial Ratio Analysis to Assess Financial Performance at BPJS Kesehatan, namely among others Liquidity Ratios, Solvency Ratios, and Profitability Ratios. The data for this final project is secondary data. Secondary data is a data source that does not directly provide data to data collectors. Secondary data refers to data collected by means of documentation, namely by collecting, recording and calculating data related to research. The type of research in this final assignment is a quantitative descriptive method. The results and discussion show that the Financial Ratio Analysis for Assessing Financial Performance at BPJS Kesehatan is quite good, because each per ratio has increased rather than decreased, but the profitability ratios (Return on Equity and Return on Assets) have decreased because profits in that year have decreased. Suggestions that can be made for completion in the final project raised by researchers are that financial performance should always be reviewed continuously so that changes that occur in the company's finances can be seen clearly and management can anticipate and quickly make decisions for the

possibilities that may arise. may occur in the future and to further improve the company's performance in the future.

Keywords: Financial Statements, Liquidity Ratios, Solvency Ratios, Profitability Ratios, Financial Performance

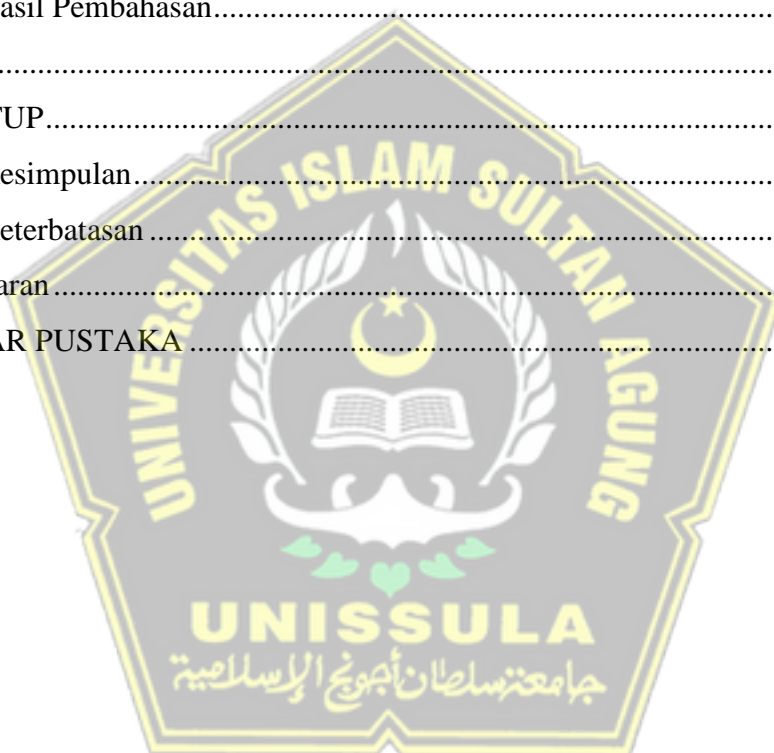


DAFTAR ISI

Halaman

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJAKEUANGAN PADA BPJS KESEHATAN	i
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BPJS KESEHATAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
BAB I.....	i
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Praktis.....	6
1.4.2 Teoritis	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kinerja Keuangan.....	7
2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	7
2.3 Laporan Keuangan	9
2.4 Karakteristik Laporan Keuangan.....	11
2.5 Jenis Jenis Alat Ukur Kinerja Keuangan.....	12
2.6 Analisa Laporan Keuangan	18
2.7 Tujuan Analisa Keuangan	19
2.8 Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan.....	19
BAB III	22
METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian	22

3.2 Objek Penelitian	22
3.3 Definisi Operasional.....	23
3.3.1 Kinerja Keuangan	23
3.4 Sumber Data	25
BAB IV	26
HASIL DAN PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	26
4.1.1 Sejarah Singkat BPJS Kesehatan	26
4.1.2 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan	28
4.2 Hasil Pembahasan.....	30
BAB V.....	42
PENUTUP.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Keterbatasan	44
5.3 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia harus tetap sehat untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari kelemahan atau penyakit. Karena nilai kesehatan, pemerintah Indonesia membentuk organisasi hukum publik dengan jalur pelaporan langsung kepada Presiden dan bertugas mengelola program jaminan kesehatan nasional negara. Kesehatan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau dikenal dengan BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Pensiun adalah lima program SJSN Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kematian. Askes (Asuransi Kesehatan) adalah nama BPJS Kesehatan sebelumnya, yang dijalankan oleh PT Askes Indonesia (Persero), hingga 1 Januari 2011, ketika PT Askes Indonesia berubah nama menjadi BPJS Kesehatan (Suparji, 2020) sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 mengatur tentang BPJS. Menurut Pasal 2 RUU BPJS, BPJS Kesehatan didirikan dengan pembiayaan yang mula-mula disediakan oleh APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan

perseorangan, yang meliputi harta dari dana jaminan sosial yang bersumber sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kekayaan dari harta kekayaan BPJS Kesehatan (bpjskesehatan.go.id). Pembayaran BPJS Kesehatan dilakukan dengan memberikan iuran setiap bulan dengan tarif yang ditentukan oleh tingkat kelas yang telah dipilih disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Karena beragamnya penyakit dan tidak dapat diprediksi kemunculannya, masyarakat Indonesia membutuhkan BPJS Kesehatan dan memanfaatkan bantuannya. Sejak tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami defisit meskipun masyarakat terus menggunakan layanan tersebut. Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, sejak 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 1,9 triliun yang tumbuh menjadi Rp 9,4 triliun pada 2015 sebelum pemerintah turun tangan menyuntikkan dana sebesar Rp. 5 triliun agar BPJS Kesehatan dapat tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Situmorang, 2019). Pertimbangan seperti masih adanya kekurangan BPJS Kesehatan Efisiensi pelayanan klinis yang belum dilakukan, standar kelas Non-PBI, dan manfaat pengobatan yang sangat luas tanpa cost-sharing menjadi salah satu ciri kelas standar BPJS Kesehatan. Penerima Bantuan (PBI) (Gloria, 2020). Laporan keuangan biasanya digunakan oleh bisnis untuk memperkirakan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian perusahaan di masa lalu, sekarang, dan masa depan selain memberikan informasi penting untuk mengukur pertumbuhan perusahaan (Suhendro, 2018). Analisis rasio

keuangan dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian perusahaan dari laporan keuangannya. Rasio keuangan umumnya dapat digunakan untuk memberikan gambaran kepada analis tentang keuntungan dan kerugian dari laporan keuangan perusahaan. Penggunaan rasio keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dengan menelaah statistik keuangan tersebut, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan organisasi sektor keuangan (Ramadhan et al., 2020). Berdasarkan data dalam laporan keuangan, rasio keuangan dapat diturunkan. Pelaku bisnis, manajemen, pemerintah, dan mereka yang menggunakan laporan keuangan dapat menganggap rasio keuangan membantu dalam menilai kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, laporan keuangan merupakan instrumen yang sangat penting untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan dan lintasan keuangan BPJS Kesehatan. Untuk mempelajari laporan keuangan yang dibuat oleh BPJS Kesehatan, peneliti menggunakan studi kasus laporan keuangan yang telah dibuat untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kinerja keuangan perusahaan yang telah dicapai BPJS Kesehatan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penilaian atas efisiensi kegiatan perusahaan dalam mengelola semua aset yang ada untuk menentukan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

Laporan peningkatan kinerja keuangan perusahaan untuk BPJS Kesehatan disajikan di bawah ini.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Kinerja Keuangan Perusahaan
BPJS Kesehatan Tahun 2019 sampai 2021

Tahun	Pendapatan	Laba Bersih	Proporsi
2019	112.069.892.000	179.085.000	625,79%
2020	141.478.189.000	(128.440.000)	-110,15%
2021	146.587.780.000	468.192.000	313,09%

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlihat bahwa pertumbuhan BPJS Kesehatan dari sisi kinerja keuangan cukup stabil karena rasio pendapatan meningkat antara tahun 2019 dan 2021. Sebaliknya, dibandingkan tahun 2019 dan 2020, rasio laba bersih tahun 2020 turun menjadi kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa dari satu periode ke periode sebelumnya, kemampuan BPJS Kesehatan dalam menghasilkan uang dan kemampuan memperoleh keuntungan meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan turun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian setelah melihat data diatas dengan judul **“kinerja keuangan perusahaan pada BPJS Kesehatan yang ditinjau dari analisa rasio keuangan, baik rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang, penulis berharap untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Keuangan perusahaan pada BPJS Kesehatan tahun 2019 sampai tahun 2021 jika ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas.

1.3 Tujuan

Menganalisis ekspektasi kinerja keuangan perusahaan pada BPJS Kesehatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas merupakan tujuan dari tugas akhir ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Praktis

Manfaat dari temuan penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna dan faktor penting bagi BPJS Kesehatan terkait untuk lebih memahami prakiraan kinerja keuangan perusahaan dalam hal rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

1.4.2 Teoritis

Pembuatan tugas akhir ini secara teoritis akan berfungsi sebagai sumber informasi ilmiah untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan penulis tentang Analisis Rasio Kinerja Keuangan di BPJS Kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan

Penilaian para ahli terhadap kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hery (2016), kinerja keuangan adalah upaya resmi untuk menilai seberapa baik kinerja suatu perusahaan dalam menciptakan laba dan posisi kas tertentu. Potensi keuangan perusahaan untuk berkembang dan berkembang dengan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya dapat dievaluasi dengan mengukur kinerja keuangan. Jika sebuah perusahaan mencapai kinerja tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, itu dikatakan berhasil.
2. Menurut Fahmi (2018), kajian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menggunakan norma-norma pelaksanaan keuangan.
3. Kinerja keuangan menurut Sanjaya Surya (2018) adalah tingkat pencapaian yang dicapai organisasi dalam rangka mencapai hasil pengelolaan keuangan yang efektif.

1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Mahmudi (2019) mengklaim bahwa menetapkan pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai apakah target dan sasaran kinerja organisasi

tercapai atau tidak. Indikator kinerja ini juga berfungsi sebagai panduan atau tolok ukur seberapa baik tujuan organisasi dicapai.

Karena pengukuran kerja dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas, Mahmudi (2019) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen pengendalian manajemen. Setiap kinerja kegiatan harus dievaluasi untuk menentukan tingkat kemanjuran dan efisiensinya.

Banyak pendekatan analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, menurut Jumingan dalam Saragih (2017). Tergantung pada metodenya, ada delapan kategori analisis keuangan yang berbeda, termasuk:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah jenis metode perbandingan analisis yang menunjukkan perubahan secara total (absolut) dan persentase untuk laporan keuangan dua periode atau lebih (relatif).
2. Analisis tren (kecenderungan posisional) adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan apakah kondisi keuangan cenderung membaik atau memburuk.
3. Analisis persentase per komponen (common size) adalah metode analisis yang digunakan untuk menghitung proporsi investasi setiap aset terhadap jumlah keseluruhan aset dan utang.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja adalah pendekatan analisis yang digunakan untuk membandingkan dua periode waktu dan menghitung besaran sumber dan penggunaan modal kerja.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Uang Tunai adalah suatu metode analisis untuk mengetahui keadaan uang tunai serta sebab-sebab fluktuasi uang selama periode waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan adalah metode analisis keuangan yang menunjukkan bagaimana berbagai pos dalam neraca dan laporan laba rugi saling berhubungan satu sama lain baik secara terpisah maupun secara bersamaan.
7. Metode analisis untuk menentukan posisi laba dan alasan perubahan laba adalah analisis perubahan laba kotor.
8. Analisis titik impas adalah strategi untuk menghitung tingkat pendapatan yang harus dicapai untuk mencegah kerugian bagi organisasi.

2.3 Laporan Keuangan

1. Menurut Suteja (2018), laporan keuangan adalah dokumen yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak berkepentingan yang merangkum keadaan keuangan dari hasil suatu prosedur akuntansi selama periode waktu tertentu.
2. Kasmir menyatakan bahwa laporan keuangan adalah “laporan yang mengungkapkan posisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam jangka waktu tertentu” dalam Winarno (2017).

3. Laporan keuangan merupakan instrumen yang sangat signifikan untuk mempelajari status keuangan dan pencapaian yang diperoleh organisasi yang bersangkutan. Munawir dalam Sari (2017).
4. Laporan keuangan adalah gambaran terstruktur tentang status keuangan dan kinerja keuangan suatu usaha, menurut PSAK No. 1 tahun (Sari, 2017). Dokumen ini menyajikan sejarah terukur dari subjek dalam bentuk uang.

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir dalam (Sari, 2017) Laporan keuangan harus:

- a. Berikan rincian mengenai jenis dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan saat ini.
- b. Menggambarkan jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang sekarang dimiliki korporasi.
- c. Menawarkan perincian tentang jenis dan jumlah pendapatan yang dihasilkan selama periode waktu tertentu.
- d. Menawarkan perincian tentang total biaya dan berbagai biaya yang dikeluarkan organisasi dalam periode waktu tertentu.
- e. Jelaskan setiap perubahan pada modal, kewajiban, atau aset perusahaan.
- f. Menawarkan perincian tentang manajemen kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu.
- g. Berikan rincian tentang catatan laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam (Sari, 2017) menggunakan laporan keuangan untuk menyajikan informasi mengenai status keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pembaca laporan dalam membuat pilihan keuangan.

1.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan memuat informasi keuangan yang utamanya adalah informasi kuantitatif menurut Dwi Martani dalam (Nasution, 2018). Informasi harus memenuhi persyaratan kualitatif tertentu agar bermanfaat bagi pengguna. Ciri-ciri kualitatif ini memungkinkan data kuantitatif laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Empat ciri kualitatif utama dari akun keuangan, menurut PSAK, adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami. Pengguna harus dapat memahami laporan keuangan agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang kegiatan ekonomi, akuntansi perusahaan, dan kemauan untuk meneliti informasi untuk memahaminya.
2. Mirip. Pengguna harus membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkannya dengan entitas lain agar dapat memeriksa tren kinerja dan menentukan posisi entitas dalam lingkungan bisnis. Pengukuran dan penyajian transaksi dan peristiwa

lain yang sebanding harus dilakukan secara konsisten antar periode dan dengan entitas lain untuk memungkinkan perbandingan di antara mereka. Entitas harus memasukkan informasi dari periode sebelumnya dalam laporan keuangan karena pengguna sering membandingkan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan status keuangan antar periode. rincian tentang uang harus diberikan dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya.

3. Relevansi mengacu pada betapa berharganya pengetahuan untuk membuat keputusan. Informasi dikatakan relevan jika mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan mendukung evaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, atau hipotetis masa depan, serta dengan memvalidasi dan mengoreksi temuan evaluasi sebelumnya. Namun, jika penyajian informasi tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut dapat menipu.

2.5 Jenis Jenis Alat Ukur Kinerja Keuangan

Jumingan membagi analisis keuangan menjadi delapan kategori dalam (Sabil, 2016), antara lain:

1. Analisis komparatif laporan keuangan membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih dengan menyoroti perubahan baik secara total (absolut) maupun persentase (relatif).

2. Analisis tren (kecenderungan posisional) adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan apakah tren situasi keuangan menunjukkan peningkatan atau memburuk.
3. Analisis persentase per komponen (common size) adalah suatu metode untuk mengetahui berapa proporsi total aset atau total aset dan utang yang diinvestasikan pada masing-masing aset.
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah metode analisis kuantitatif yang menilai besarnya sumber dan penggunaan modal kerja dengan dua periode yang dikontraskan.
5. Analisis kas adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui keadaan kas serta penyebab terjadinya perubahan kas dalam jangka waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan adalah teknik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memastikan keterkaitan antara pos-pos tertentu dalam laporan laba rugi dan neraca baik secara terpisah maupun secara bersamaan.
7. Analisis perubahan laba kotor adalah metode untuk menentukan di mana laba berada dan apa yang menyebabkannya berfluktuasi.
8. Analisis titik impas adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencegah kerugian bagi organisasi.

(Kasmir, 2018) menegaskan bahwa ada banyak Alat untuk mengukur kinerja keuangan antara lain sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menurut Harahp (2009) adalah statistik yang menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban segeranya. Artinya, jika bisnis ditagih, ia akan dapat membayar kewajibannya, terutama jika sudah lewat jatuh tempo.

1) *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek yang ditagih secara keseluruhan dan akan segera jatuh tempo. Menurut Kasmir (2018), rasio lancar tipikal untuk sektor ini adalah 200%.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

2) *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio ini disebut juga dengan rasio cepat yang menggambarkan kemampuan usaha untuk menyelesaikan kewajiban lancar atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory). Standar industri untuk rasio cepat menurut Kasmir (2018) adalah 150%.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Asset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

3) *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk membayar hutang ditentukan dengan menggunakan metrik yang disebut rasio kas. Kasmir (2018) memperkirakan bahwa rasio kas rata-rata industri adalah 50%.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menurut Kasmir (2018) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang yang digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Ini mengacu pada berapa banyak hutang yang dimiliki bisnis sehubungan dengan asetnya.

1) *Total Debt to Total Aset Ratio* (Rasio Kewajiban atas aset)

Rasio utang yang membandingkan total utang dengan total aset diukur dengan menggunakan rasio ini. Kasmir (2018) memperkirakan rata-rata industri DAR adalah 35%.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2) *Debt to Equity Ratio* (Rasio Kewajiban atas Ekuitas)

Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi rasio utang terhadap ekuitas. Kasmir (2018) memperkirakan rata-rata DER industri adalah 81%.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

c. Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Menggunakan rasio profitabilitas melibatkan membandingkan banyak elemen laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca, untuk mengukur tingkat efektivitas manajerial perusahaan.

1) *Profit Margin* (Margin Laba)

Ukuran laba yang memanfaatkan laba setelah bunga dan pajak dalam kaitannya dengan penjualan disebut margin laba bersih. Hani dan Maya (2021) memperkirakan rata-rata Net Profit Margin untuk sektor tersebut adalah 20%.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{EAT (Penjualan Bersih)}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2) *Return on Asset*

Adalah rasio yang menampilkan pengembalian atas semua aset perusahaan. Kasmir (2018) memperkirakan rata-rata ROA industri adalah 30%.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{EAT (Penjualan Bersih)}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

3) *Return on Equity*

Rasio ini, paling sering disebut sebagai ROE, digunakan untuk membandingkan laba bersih setelah pajak dengan modal yang diinvestasikan. Kasmir (2018) memperkirakan rata-rata ROE industri adalah 40%.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata – rata Ekuitas}} \times 100\%$$

d. Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2018), rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Alternatifnya, dapat diklaim bahwa rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya secara keseluruhan.

1) *Inventory Turnover* (perputaran persediaan)

Menurut Kasmir (2018), rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa sering uang yang diinvestasikan dalam persediaan ini berputar selama periode

waktu yang dikenal sebagai perputaran persediaan. Perputaran persediaan industri yang khas, menurut Kasmir (2018), adalah 20 kali.

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata – rata Persediaan}} \times 1 \text{ kali}$$

2) *Fixed Assets Turnover*

$$\text{Fixed Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aset tidak lancar}} \times 1 \text{ kali}$$

3) *Asset Turnover* (perputaran total aset)

Hanafi dan Halim (2018) mengklaim bahwa rasio ini mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat menghasilkan penjualan tergantung pada aset tetap yang dimiliki perusahaan. Rata-rata perputaran total aset industri menurut Kasmir (2018) adalah dua kali lipat.

$$\text{Asset Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}} \times 1 \text{ kali}$$

1.6 Analisa Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah kegiatan mendeskripsikan pos-pos laporan keuangan dan menelaah hubungan antar komponen laporan keuangan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan perusahaan

sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis maupun investasi (Suteja, 2018).

Analisis laporan keuangan menurut Jumingan dalam Sari (2017) adalah angka yang menggambarkan keterkaitan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.

1.7 Tujuan Analisa Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dipelajari, menurut Munawir dalam (Kamal, 2015), karena dengan analisis ini semua solusi atas masalah posisi keuangan dan hasil yang dicapai perusahaan diperoleh.

2.8 Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan

Berikut beberapa strategi yang sering digunakan untuk analisis laporan keuangan, menurut Munawir dalam (Suteja, 2018):

1. Analisis komparatif laporan keuangan adalah strategi dan metodologi analisis yang melibatkan perbandingan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan:
 - a) Jumlah atau data mutlak dalam rupiah.
 - b) Naik turunnya nilai rupiah.
 - c) Persentase peningkatan atau pengurangan.
 - d) Rasio digunakan untuk menyatakan perbandingan.
2. Persentase keseluruhan. Teknik analisis ini akan menunjukkan perubahan yang telah terjadi dan modifikasi mana yang membutuhkan studi tambahan.

3. Analisis tren persentase adalah teknik atau analisis yang menunjukkan tren atau kecenderungan status keuangan perusahaan dan teknik persentase kemajuan untuk menentukan apakah status keuangannya memiliki kecenderungan konstan, meningkat, atau bahkan menurun.
4. Metode analisis untuk menentukan persentase investasi pada setiap aset terhadap total asetnya, serta untuk menentukan struktur modal dan komposisi biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kuantitas penjualan, adalah laporan dengan persentase per komponen atau pernyataan ukuran umum.
5. Analisis modal kerja berupaya mengidentifikasi sumber dan penggunaan modal kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan modal kerja dari waktu ke waktu.
6. Analisis laporan arus kas adalah studi untuk menentukan sumber dan penggunaan uang tunai Untuk menentukan penyebab variasi jumlah uang atau untuk mempelajari dari mana asalnya dan digunakan untuk apa dalam waktu tertentu.
7. Analisis rasio adalah teknik analisis untuk menentukan hubungan unsur-unsur tertentu dalam laporan laba rugi atau neraca, baik secara terpisah maupun bersama-sama dengan kedua laporan tersebut.
8. Analisis perubahan laba kotor adalah untuk menentukan penyebab fluktuasi laba kotor perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya atau dalam satu periode dibandingkan dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut.

9. Analisis impas adalah perhitungan jumlah pendapatan yang diperlukan suatu bisnis untuk menghindari kerugian, tetapi juga gagal menghasilkan keuntungan. Dengan bantuan analisis titik impas ini, tingkat penjualan yang berbeda akan sesuai dengan jumlah laba atau rugi yang berbeda.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tugas akhir ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif menurut Sugiyono (2018) adalah metode untuk mengevaluasi, mengukur, dan menguji hipotesis yang didasarkan pada perhitungan matematis dan statistik. Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk mendeskripsikan suatu keadaan dengan bantuan literature review guna memperkuat analisis dan kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan. Temuan penelitian diperoleh dari perhitungan indikator variabel penelitian yang kemudian ditulis oleh penulis.

Analisis Rasio Keuangan Menilai Kinerja Keuangan BPJS Kesehatan dijelaskan dan dianalisis dalam hal ini secara deskriptif kuantitatif oleh penulis.

3.2 Objek Penelitian

Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018) obyek penelitian adalah kualitas, sifat, atau nilai yang membedakan individu, benda, atau aktivitas satu sama lain dan yang telah dipilih peneliti untuk diselidiki, dianalisis, dan ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran atau item yang akan menjadi fokus penelitian tambahan.

Analisis Rasio Keuangan Menilai Kinerja Keuangan BPJS Kesehatan menjadi objek penelitian tugas akhir ini.

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Kinerja Keuangan

Menurut para ahli kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hery (2016), kinerja keuangan adalah upaya resmi untuk menilai seberapa baik kinerja suatu perusahaan dalam menciptakan laba dan posisi kas tertentu. Kinerja keuangan diukur melalui kemungkinan keuangan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dapat dilihat dengan mengandalkan sumber daya yang tersedia. Jika sebuah perusahaan mencapai kinerja tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, itu dikatakan berhasil.
2. Menurut Fahmi (2018), kajian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menggunakan norma-norma pelaksanaan keuangan.
3. Kinerja keuangan menurut Sanjaya Surya (2018) adalah tingkat pencapaian yang dicapai organisasi untuk memperoleh hasil pengelolaan keuangan yang berhasil.

3.3.1 Jenis dan alat ukur kinerja keuangan

- a. Rasio Likuiditas

1) *Current Ratio* (Rasio Lancar)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Solvabilitas

1) *Total Debt to Total Aset Ratio* (Rasio Kewajiban atas aset)

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2) *Debt to Equity Ratio* (Rasio Kewajiban atas Ekuitas)

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

c. Rasio Profitabilitas

1) *Profit Margin* (Margin Laba)

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{EAT (Penjualan Bersih)}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2) *Return on Equity*

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{EAT (Penjualan Bersih)}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Ekuitas

3) *Return on Asset*

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata – rata Ekuitas}} \times 100\%$$

3.4 Sumber Data

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memasok data ke pengumpul data. Data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan perhitungan data yang terkait dengan penelitian. Kinerja rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas laporan keuangan tahun 2019 dijadikan sebagai data sekunder kajian. Kinerja rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas pada laporan keuangan tahun 2020. Kinerja BPJS Kesehatan ditinjau dari rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas laporan keuangan tahun 2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui pendokumentasian laporan laba rugi dan neraca BPJS Kesehatan memiliki lembar-lembar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat BPJS Kesehatan

Pada zaman penjajahan Belanda, asuransi kesehatan sudah ada di Indonesia. Saat Indonesia merdeka, layanan kesehatan tetap ada. Pemerintah Indonesia tetap membutuhkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya, setelah mendapat pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Program Jaminan Kesehatan diusulkan oleh Menteri Kesehatan Prof. G. A. Siwabessy untuk tahun 1966–1978 karena program ini mulai dilaksanakan di beberapa negara maju. Program ini berkembang pesat. Program Jaminan Kesehatan hanya memperbolehkan pegawai negeri dan keluarganya untuk menjadi penerima manfaat pada saat diberlakukan. Prof. G. A. Siwabessy yakin suatu saat nanti seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses Program Jaminan Kesehatan yang menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan. Pada 1 Januari 2014, PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan (Persero). Ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pertama kali muncul konsep BPJS Kesehatan (UU SJSN).

Berikut penjabaran visi dan misi BPJS Kesehatan:

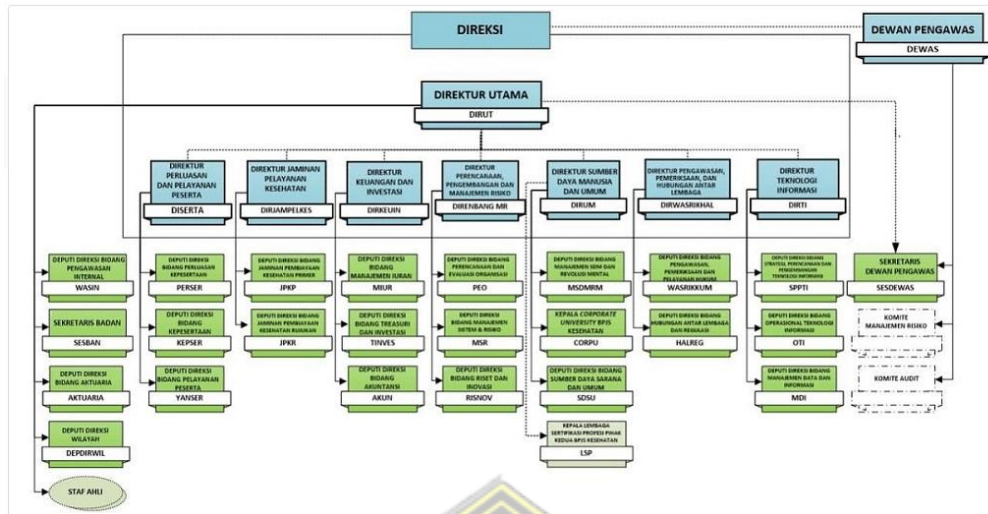
- VISI

Berkembang menjadi badan pengelola yang dinamis, amanah, dan akuntabel untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berjangka panjang, berkeadilan, dan inklusif.

- MISI

- Memanfaatkan layanan terpadu berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan peserta.
- Memastikan program JKN KIS berkelanjutan secara finansial dengan menjaga keseimbangan Dana Jaminan Sosial dan mengelola biaya manfaat.
- Menyediakan asuransi kesehatan yang terjangkau untuk seluruh warga negara Indonesia.
- Meningkatkan partisipasi dengan lebih membina kerjasama dan sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program JKN KIS.
- Memperkuat kapasitas Badan untuk menjalankan program JKN KIS secara bertanggung jawab, berhati-hati dengan berpegang pada prinsip tata kelola yang baik, memanfaatkan sumber daya manusia secara produktif, serta mendorong transformasi digital dan inovasi yang berkelanjutan.

4.1.2 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Berikut wewenang dan tanggungjawab jabatan yang ada di BPJS Kesehatan yaitu:

Tujuh profesional yang mewakili berbagai pemangku kepentingan jaminan sosial menjadi Dewan Pengawas. yaitu: dua wakil pemerintah dan dua wakil angkatan kerja. 2 orang karyawan perusahaan. Salah satu tokoh masyarakat. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas. Presiden mengangkat salah seorang anggota Dewan Pengawas sebagai Ketua Dewan Pengawas. Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan lima tahun, dengan opsi diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan tambahan.

Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memantau bagaimana kewajiban BPJS dijalankan. Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk:

- a. Kebijakan Manajemen BPJS dan Kinerja Pengurus

- b. Memberi nasihat kepada Direksi tentang pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial;
- c. Mengawasi pelaksanaan keputusan Direksi tersebut; memberikan nasihat kepada Direksi tentang cara menjalankan aturan pengelolaan BPJS; dan mematuhi UU Nomor 24 Tahun 2011. Pasal 21 UU Keenam Tahun 2011 (No. 24). (Pasal 22) 45.
- d. Mencantumkan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam laporan BPJS yang disampaikan kepada Presiden, disertai tembusan kepada DJSN.

Dewan Pengawas berwenang untuk: Memutuskan rencana kerja anggaran tahunan BPJS; Meminta laporan dari Direksi; Mengakses data dan informasi terkait penyelenggaraan BPJS; Memberikan ide dan saran untuk peningkatan kinerja Direksi diberikan kepada Presiden. Sedikitnya lima orang anggota Direksi berasal dari dunia profesional. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi. Salah satu anggota Direksi dipilih oleh Presiden untuk menjabat sebagai Presiden Direktur. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan lima tahun, setelah itu mereka dapat dicalonkan untuk diangkat kembali untuk masa jabatan tambahan. Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional BPJS yang memastikan Peserta mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya yang sah. Direksi bertanggung jawab dalam menjalankan peran tersebut sebagai berikut: Melaksanakan BPJS Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi adalah bagian dari manajemen. baik di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili BPJS memastikan bahwa Dewan Pengawas memiliki akses ke sumber

daya dan ruang yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Pasal 23 UU Nomor 24 Tahun 2011 Ayat 3 Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2011. Bab 24 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk melaksanakan kewenangan BPJS, memilih struktur organisasi, tanggung jawab utama, proses kerja, dan susunan kepegawaian; melakukan pengelolaan kepegawaian BPJS yang meliputi pengangkatan, promosi, dan pemberhentian pegawai BPJS serta menghitung gajinya; Tawarkan gaji kepada Direktur dan Dewan Pengawas kepada Presiden; Menetapkan pedoman dan ketentuan pembelian produk dan jasa dengan tetap melaksanakan kewajiban BPJS dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; Mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebelum mengalihkan aset tetap BPJS sampai dengan jumlah Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); persetujuan Presiden sebelum mengalihkan aset tetap BPJS sampai dengan jumlah Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah); dan persetujuan DPR RI sebelum mengalihkan aset tetap BPJS di atas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah).

4.2 Hasil Pembahasan

Rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada BPJS Kesehatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dihitung dan dibahas pada bagian ini Berikut adalah:

a. Rasio Likuiditas

1) *Current Ratio*

$$CR = \frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$$

Kewajiban lancar

$$2019 = \frac{5.886.624.000}{643.631.000} \times 100\%$$

$$= \mathbf{915\%}$$

$$2020 = \frac{5.970.229.000}{573.689.000} \times 100\%$$

$$= \mathbf{1.041\%}$$

$$2021 = \frac{7.966.444.000}{563.933.000} \times 100\%$$

$$= \mathbf{1.413\%}$$

Untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan, *Current Ratio* BPJS Kesehatan tahun 2019 adalah 915% yang dihitung dengan membandingkan aset lancar dan kewajiban lancar. Menurut salah satu interpretasi, *Current Ratio* sebesar Rp915,00 menjadi jaminan untuk setiap Rp100,00 kewajiban lancar. *Current Ratio* perusahaan untuk tahun 2020 adalah 1.041%. Menurut salah satu interpretasi, *Current Ratio* r sebesar Rp 1.041 digunakan untuk menjamin setiap Rp 100,00 kewajiban lancar. *Current Ratio* untuk tahun 2021 sekarang menjadi 1.413%. Menurut salah satu interpretasi, *Current Ratio* sebesar Rp 1.413 digunakan untuk menjamin setiap Rp 100,00 kewajiban lancar.

Akibatnya, proporsi 126% telah meningkat dari 2019 ke 2020 karena liabilitas lancar telah menurun dan aset lancar telah meningkat melebihi ukuran liabilitas sekarang. Selain itu, akan ada tambahan persentase kenaikan sebesar 372% dari tahun 2020 ke 2021 sebagai akibat dari fakta bahwa kewajiban lancar tahun 2021 akan turun dan *Current Ratio* tahun 2021 akan lebih tinggi dari kewajiban lancar tahun 2021. Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang ditunjukkan oleh rasio likuiditas (*Current Ratio*) secara umum sangat baik dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal itu terlihat dari *Current Ratio* yaitu 915% pada tahun 2019, 1.041% pada tahun 2020, dan 1.413% pada tahun 2021. Menurut norma industri, *Current Ratio* minimal 200% adalah kriteria yang sesuai. (Kasmir, 2018).

2) *Cash Ratio*

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{984.145.000}{643.631.000} \times 100\%$$

$$= \mathbf{153\%}$$

$$2020 = \frac{1.291.764.000}{573.689.000} \times 100\%$$

$$= \mathbf{225\%}$$

$$2021 = \frac{3.853.455.000}{563.933.000} \times 100\%$$

$$= \mathbf{683\%}$$

Cash Ratio BPJS Kesehatan 2019 yang dihitung dengan membandingkan kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek adalah 153%. Menurut interpretasi ini, *Cash Ratio* senilai Rp. 153,00 digunakan untuk menjamin setiap Rp. 100,00 dalam kewajiban lancar. *Cash Ratio* perseroan pada 2020 sebesar 225 persen. Menurut salah satu interpretasi, uang tunai senilai Rp. 225,00 berfungsi sebagai jaminan untuk setiap Rp. 100,00 dalam kewajiban lancar. *Cash Ratio* untuk 2021 saat ini adalah 683%. Menurut salah satu interpretasi, uang tunai senilai Rp. 683 digunakan untuk menjamin setiap Rp. 100,00 dalam kewajiban lancar. Akibatnya, persentase 72% meningkat dari tahun 2019 ke 2020 sebagai akibat dari penurunan kewajiban lancar di tahun 2020 dan peningkatan kas relatif terhadap kewajiban lancar. Selain itu, dari Karena penurunan kewajiban lancar di tahun 2021 dan kenaikan kas relatif terhadap kewajiban lancar, akan ada penambahan persentase kenaikan sebesar 458% dari tahun 2020 ke 2021. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, kinerja keuangan BPJS Kesehatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas (*Cash Ratio*) yang secara umum sangat kuat. *Cash Ratio* tahun 2019

sebesar 153%, tahun 2020 sebesar 225%, dan tahun 2021 sebesar 683%. Hal ini didasarkan pada standar industri bahwa *Cash Ratio* lebih dari 50% termasuk kriteria baik (Kasmir, 2018).

b. Rasio Solvabilitas

1) *Total Debt to Total Asset Ratio*

$$DAR = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Total Aset

$$2019 = \frac{2.959.005.000}{13.262.092.000} \times 100\%$$

13.262.092.000

$$= 22\%$$

$$2020 = \frac{3.210.037.000}{13.372.478.000} \times 100\%$$

13.372.478.000

$$= 24\%$$

$$2021 = \frac{3.360.743.000}{13.991.723.000} \times 100\%$$

13.991.723.000

$$= 24\%$$

Pada tahun 2019, *Total Debt to Total Asset Ratio* BPJS Kesehatan sebesar 22%. Menurut salah satu interpretasi, aset senilai Rp. 22.00 dijamin untuk setiap Rp. 100,00 dalam kewajiban lancar. *Total Debt to*

Total Asset Ratio adalah 24% pada tahun 2020. Menurut salah satu interpretasi, setiap kewajiban lancar Rp 100,00 didukung oleh aset senilai Rp 24,00. *Total Debt to Total Asset Ratio* untuk tahun 2021 kini sebesar 24%. Menurut salah satu interpretasi, setiap kewajiban lancar Rp 100,00 didukung oleh aset senilai Rp 24,00. Alhasil, persentasenya meningkat dari 2019 ke 2020 sebesar 2% karena aset lebih besar dari kewajiban dan kewajiban lancar turun di 2020. Selain itu, antara 2020 dan 2021, akan ada keuntungan kekayaan, tapi tidak banyak. Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja keuangan BPJS Kesehatan tahun 2019 hingga 2021 yang ditunjukkan dengan rasio solvabilitas (*Total Debt to Total Asset Ratio*) secara umum sangat kuat. Hal itu terlihat dari *Total Debt to Total Asset Ratio*, yaitu 22% pada 2019, 24% pada 2020, dan 24% pada 2021. Hal ini berdasarkan norma industri yang menyatakan bahwa rasio kurang dari 35% terhadap *Total Debt to Total Asset Ratio* adalah tolok ukur yang diinginkan. (Kasmir,2018).

2) *Debt to Equity Ratio*

$$DER = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{2.959.005.000}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

$$10.303.087.000$$

$$= \mathbf{29\%}$$

$$2020 = \frac{3.210.037.000}{10.162.441.000} \times 100\%$$

$$10.162.441.000$$

$$= \mathbf{32\%}$$

$$2021 = \frac{3.360.743.000}{10.630.981.000} \times 100\%$$

$$10.630.981.000$$

$$= \mathbf{32\%}$$

Pada 2019, *Debt to Equity Ratio* BPJS Kesehatan adalah 29%. Menurut interpretasi ini, setiap kewajiban lancar sebesar Rp 100,00 didukung oleh ekuitas sebesar Rp 29,00. *Debt to Equity Ratio* adalah 32% pada tahun 2020. Menurut interpretasi ini, ekuitas sebesar Rp 32,00 berfungsi sebagai jaminan untuk setiap kewajiban lancar Rp 100,00. Selain itu, *Debt to Equity Ratio* akan menjadi 32% pada tahun 2021. Menurut interpretasi ini, ekuitas sebesar Rp32,00 berfungsi sebagai jaminan untuk setiap kewajiban lancar Rp100,00. Karena peningkatan kewajiban lancar tahun 2020, tetapi peningkatan ekuitas, *Debt to Equity Ratio* tumbuh dari 2019 ke 2020 sebesar 3%. Akan ada kenaikan ekuitas dari 2020 ke 2021, meski tidak terlalu besar. Kinerja keuangan BPJS Kesehatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang

ditunjukkan oleh rasio solvabilitas (*Debt to Equity Ratio*) secara umum sangat kuat, menurut penjelasan di atas. Hal itu terlihat *Debt to Equity Ratio* sebesar 29% pada tahun 2019, 32% pada tahun 2020, dan 32% pada tahun 2021. Hal ini berdasarkan norma industri yang menyatakan bahwa kriteria yang baik adalah *Debt to Equity Ratio* dari 81% . (Kasmir, 2018).

c. Rasio Profitabilitas

1) Net Profit Margin

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{179.085.000}{4.091.143.000} \times 100\%$$

$$= 4\%$$

$$2020 = \frac{(128.440.000)}{4.098.664.000} \times 100\%$$

$$= -3\%$$

$$2021 = \frac{468.192.000}{4.093.331.000} \times 100\%$$

$$= 11\%$$

Pada tahun 2019, *Net Profit Margin* BPJS Kesehatan sebesar 4%. Berdasarkan hal ini, keuntungan sebesar Rp 4,00 akan dihasilkan dari setiap pendapatan Rp 100,00. Ini akan menjadi -3% pada tahun 2020. Menurut ini, keuntungan sebesar Rp -3,00 akan dihasilkan dari setiap pendapatan Rp100,00. Kemudian menjadi 11% pada tahun 2021. Dengan demikian, keuntungan sebesar Rp11,0 akan dihasilkan dari setiap pendapatan Rp100,00. Proporsi turun dari 2019 ke 2020 sebesar -7% sebagai akibat dari laba yang lebih rendah pada tahun 2020 dan kerugian yang disebabkan oleh tingginya biaya asuransi kesehatan pada tahun 2020 (\$95.511.820.000). Karena adanya peningkatan pendapatan di tahun 2021 maka persentasenya akan naik sebesar 8% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Menimbang perbincangan Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kinerja keuangan BPJS Kesehatan secara keseluruhan dari tahun 2019 ke tahun 2021 yang ditentukan oleh rasio Profitabilitas (*Net Profit Margin*) bervariasi. . Jelas dari *Net Profit Margin* adalah 4% pada 2019, -3% pada 2020, dan 11% pada 2021. Karena penurunan laba pada 2019 dan 2020, kriteria untuk 2019 dan 2020 tidak menguntungkan karena berada di bawah rata-rata industri 5%. Hal ini berdasarkan norma industri yang menyatakan bahwa syarat yang baik adalah *Net Profit Margin* lebih dari 5%. (Hani dan Maya, 2021).

2) *Return on Equity*

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Ekuitas

$$2019 = \frac{179.085.000}{10.303.087.000} \times 100\%$$

$$= 2\%$$

$$2020 = \frac{(128.440.000)}{10.162.441.000} \times 100\%$$

$$= -1\%$$

$$2021 = \frac{468.192.000}{10.630.743.000} \times 100\%$$

$$= 4\%$$

Return on Equity BPJS Kesehatan tahun 2019 sebesar 2%. Dapat disimpulkan bahwa laba bersih sebesar Rp 2,00 dapat dihasilkan untuk setiap Rp 100,00 dari ekuitas sendiri. *Return on Equity* BPJS Kesehatan tahun 2020 adalah -1%. Dapat disimpulkan bahwa laba bersih sebesar Rp -1,00 dapat dihasilkan untuk setiap Rp 100,00 dari ekuitas sendiri. Pengembalian ekuitas BPJS Kesehatan pada tahun 2021 adalah 4%. Dapat disimpulkan bahwa laba bersih sebesar Rp4,00 dapat dihasilkan untuk setiap Rp100,00 ekuitas sendiri. Persentase turun dari 2019 ke 2020 sebesar -3% sebagai akibat dari laba yang lebih rendah pada tahun 2020 dan kerugian yang disebabkan oleh tingginya biaya asuransi

kesehatan pada tahun 2020 sebesar 95.511.820.000. Tahun 2020 dan 2021 akan terlihat karena kenaikan keuntungan di tahun 2021, akan ada kenaikan persentase 3%. Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja keuangan BPJS Kesehatan secara keseluruhan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang ditunjukkan dengan rasio Profitabilitas (*Return on Equity*) bervariasi. Hal itu terlihat dari *Return on Equity* yang sebesar 2% di tahun 2019, -1% di tahun 2020, dan 4% di tahun 2021. Hal ini didasarkan pada norma industri yang menyatakan bahwa *Return on Equity* di bawah 40% tidak baik. (Kamsir,2018).

3) *Return on Asset*

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{179.085.000}{13.262.092.000} \times 100\%$$

$$= 1\%$$

$$2020 = \frac{(128.440.000)}{13.372.478.000} \times 100\%$$

$$= -1\%$$

$$2021 = \frac{468.192.000}{\dots} \times 100\%$$

13.991.723.000

= 3%

Return on Asset BPJS Kesehatan tahun 2019 sebesar 1%. Dapat disimpulkan bahwa laba bersih sebesar Rp 1 dapat dihasilkan untuk setiap aset Rp 100,00. *Return on Asset* BPJS Kesehatan pada tahun 2020 adalah -1%. Dapat disimpulkan bahwa laba bersih sebesar Rp -1,00 dapat dihasilkan untuk setiap aset Rp 100,00. *Return on Asset* BPJS Kesehatan tahun 2021 sebesar 3%. Dapat disimpulkan bahwa laba bersih sebesar Rp 3,00 dapat dihasilkan untuk setiap aset Rp 100,00. Karena keuntungan yang lebih rendah pada tahun 2020 dan tingginya biaya asuransi kesehatan pada tahun 2020 (95.511.820.000), persentase turun dari tahun 2019 ke 2020 sebesar -2%, mengakibatkan kerugian. Antara tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan akan meningkat 2%, sebagai akibat dari laba yang lebih tinggi di tahun 2021. Berdasarkan pembahasan di atas, kinerja keuangan BPJS Kesehatan secara keseluruhan dari tahun 2019 hingga 2021 ditunjukkan oleh rasio Profitabilitas (*Return on Asset*) telah bervariasi. Hal itu terlihat dari *Return on Asset*, yaitu 1% di tahun 2019, -1% di tahun 2020, dan 3% di tahun 2021. Hal ini sesuai dengan standar industri yang menyatakan bahwa *Return on Asset* kurang dari 30% adalah negatif. (Kamsir,2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelaahan atas laporan keuangan BPJS Kesehatan berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat ditarik kinerja keuangan BPJS Kesehatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio likuiditas dilihat dari *Current Ratio* tahun 2019 sebesar 915%, tahun 2020 sebesar 1.041%, dan tahun 2021 sebesar 1.413%. Bahwa *Current Ratio* tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini didasarkan pada standar industri bahwa *Current Ratio* lebih dari 200% termasuk kriteria baik (Kamsir,2018). Sedangkan dilihat dari *Cash Ratio* tahun 2019 sebesar 153%, tahun 2020 sebesar 225%, dan tahun 2021 683%. Bahwa *Cash Ratio* tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini didasarkan pada standar industri bahwa *Cash Ratio* lebih dari 50% termasuk kriteria baik (Kamsir,2018).
2. Berdasarkan rasio solvabilitas dilihat dari *Total Debt to Total Asset Ratio* pada tahun 2019 sebesar 22%, tahun 2020 sebesar 24% dan tahun 2021 adalah sebesar 24%. Bahwa *Total Debt to Total Asset Ratio* pada tahun 2019 lebih baik daripada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini didasarkan pada standar industri bahwa *Total Debt to Total Asset Ratio* kurang dari 35% termasuk kriteria baik (Kamsir,2018). Selanjutnya apabila dilihat dari *Debt to*

Equity Ratio pada tahun 2019 sebesar 29% , tahun 2020 sebesar 32% dan tahun 2021 sebesar 32%. Bahwa *Debt to Equity Ratio* pada tahun 2019 lebih baik daripada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini didasarkan pada standar industri bahwa *Debt to Equity Ratio* kurang dari 81% termasuk kriteria baik (Kamsir,2018).

3. Berdasarkan rasio profitabilitas dilihat dari *Net Profit Margin* tahun 2019 sebesar 4%, tahun 2020 sebesar -3% dan tahun 2021 sebesar 11%. Dilihat dari *Net Profit Margin* pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 diukur dari standar industri *Net Profit Margin* memiliki kriteria tidak baik, karena kurang dari standar industri yaitu sebesar 5% (Hani dan Maya,2021). Untuk tahun 2021 diukur dari standar industri *Net Profit Margin* memiliki kriteria baik, karena di atas standar industri yaitu sebesar 5% (Hani dan Maya,2021). Sedangkan dilihat dari *Return On Equity* tahun 2019 sebesar 2%, tahun 2020 sebesar -1%, dan tahun 2021 sebesar 4%. Dilihat dari *Return On Equity* pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diukur dari standar industri *Return On Equity* memiliki kriteria tidak baik, karena kurang dari standar industri yaitu sebesar 40% (Kamsir,2018). Selanjutnya *Return On Asset* tahun 2019 sebesar 1%, tahun 2020 sebesar -1%, dan tahun 2021 sebesar 3%. Dilihat dari *Return On Asset* pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diukur dari standar industri *Return On Asset* memiliki kriteria tidak baik, karena kurang dari standar industri yaitu sebesar 30% (Kamsir,2018).

Secara keseluruhan, kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas adalah kuat. Akan tetapi pada rasio

profitabilitas cenderung turun dari perhitungan rasio *Return On Equity* dan *Return On Asset*. Faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan pada rasio profitabilitas (ROE dan ROA) dikarenakan laba bersih pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Laba yang semakin rendah dapat disebabkan oleh pendapatan yang semakin rendah dan dikarenakan biaya-biaya didalam perusahaan yang semakin tinggi. Biaya yang tertinggi yaitu terdapat di biaya jaminan kesehatan, dikarenakan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tersebut terjadi gejala pandemi Covid-19 yang melanda bangsa indonesia. Kolektibilitas pembayaran peserta JKN-KIS juga dipengaruhi oleh turunnya pendapatan masyarakat. kemampuan keuangan akibat Covid-19, khususnya untuk sektor wiraswasta atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), serta beberapa kelompok lainnya segmen pekerja upahan (PPU) Badan Usaha Dimungkinkan bahwa penganggaran pembayaran JKN-KIS, khususnya oleh pemerintah daerah, tidak akan berjalan dengan efektif jika APBN dan APBD dirasionalkan bersamaan dengan kondisi ekonomi yang belum pulih akibat wabah Covid-19.

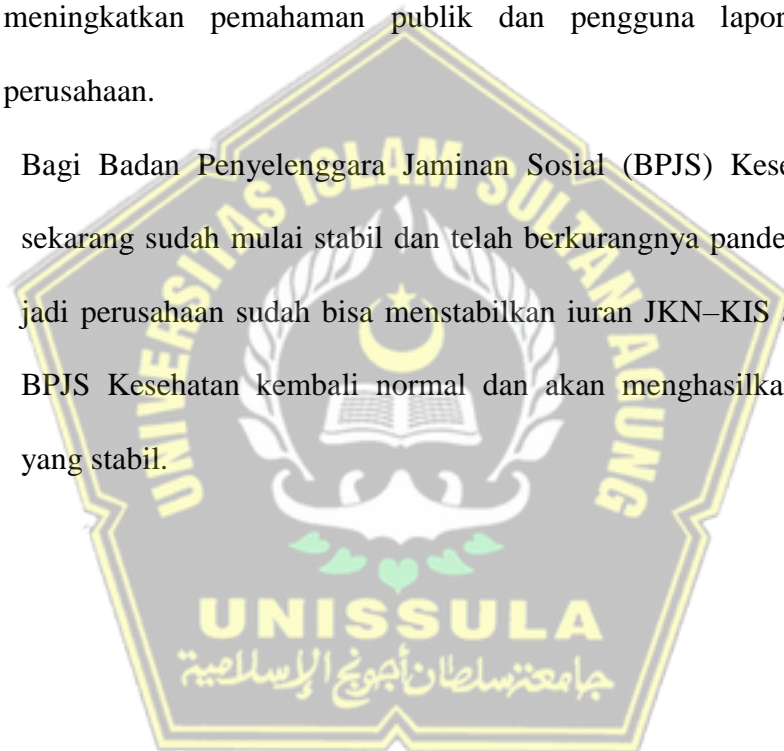
5.2 Keterbatasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum merilis laporan keuangan dan hanya memberikan informasi yang terbatas, sehingga peneliti tidak dapat menentukan penyebab kerugian dan keuntungan usaha.

5.3 Saran

Para peneliti menawarkan beberapa saran yang dapat membantu berdasarkan deskripsi pembahasan dan kesimpulan yang telah dibuat, antara lain:

- 1) Catatan atas laporan keuangan atau penjelasan tentang kerugian yang timbul harus disediakan dan dipublikasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Publikasi ini identik dengan publikasi yang diterbitkan oleh perusahaan publik dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman publik dan pengguna laporan keuangan perusahaan.
- 2) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena sekarang sudah mulai stabil dan telah berkurangnya pandemi Covid-19, jadi perusahaan sudah bisa menstabilkan iuran JKN-KIS agar anggaran BPJS Kesehatan kembali normal dan akan menghasilkan keuntungan yang stabil.



DAFTAR PUSTAKA

- Elisa. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Pada Pt. Jasa Sarana Citra Bestari Cabang Bengkalis Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 56–76.
- Fay, D. L. (1967). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 11–82.
- Ii, B. A. B. (2020). *Paulus A Sihombing_SKRIPSI_Bab2*. 7–30.
- BPJS Kesehatan. “BPJS Kesehatan.” *Bpjs-Kesehatan.go.id*, 2020, bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/3. Accessed 22 Jan. 2023.
- Roudhotul Badriah. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Current Ratio dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Assets dan Return On Equity (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2019)*. 8–31. <http://repository.stie.ac.id/id/eprint/5124>
- Soemarsono. (2010). Pengertian Laporan Keuangan Menurut Para Ahli. *Www.Dosenpendidikan.Co.Id*, 7–26. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-laporan-keuangan/>
- hafidh, and Hafidh. “Analisis Rasio Keuangan Perusahaan (Financial Analysis Ratio) - Mekari Jurnal.” *Mekari Jurnal*, 13 July 2022, www.jurnal.id/id/blog/rumus-rasio-keuangan-untuk-analisis-rasio-keuangan-perusahaan/. Accessed 22 Jan. 2023.

Sulastrri, P., & Hapsari, N. M. (2015). Analisa Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus PT. Andalan Finance Indonesia Tahun 2011-2013). *e-jurnal STIE dharma putra semarang*, 1–17.

BPJS Kesehatan.” *Bpjs-Kesehatan.go.id*, 2022, bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/2. Accessed 22 Jan. 2023.

Wicaksana, A. (2016). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Organ, Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Dan Pengelolaan Dana Investasi. *Https://Medium.Com/*, 3, 40–64.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Margaretha, V. G., Manoppo, W. S., Pelleng, F. A. O., Administrasi, J. I., & Bisnis, A. (2021). Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT. ACE Hardware Indonesia Tbk. *Jurnal Productivity*, 2(2), 169–170.

